

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai kabupaten yang paling muda yang berdiri pada 2013, membuat kabupaten Pesisir Barat menjadi sosok kabupaten yang masih perlu penyempurnaan dari berbagai aspek penyusunan anggaran maupun laporan keuangan. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan sumber dana nya, maka pemerintah kabupaten Pesisir Barat harus bekerja keras untuk menjadi kabupaten yang maju, minimal setara dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Lampung.

Keterbatasan sumber daya manusia, belum semua pegawai yang paham dengan pengelolaan keuangan maupun penyusunan laporan keuangan. Ditambah dengan semua pekerjaan yang masih dikerjakan secara manual, menyebabkan banyak berkas dan laporan yang kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini yang diduga laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan penilaian opini tidak menyatakan pendapat (*Disclaimer of Opinion*) dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2014. Tentu saja opini *disclaimer* memicu para pejabat agar Kabupaten Pesisir Barat belajar lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah, menetapkan kebijakan, serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi adalah salah satu prinsip dari *good governance*. Lebih jauh lagi, transparansi juga terdapat dalam PP. Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.). Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawabandan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper-tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, (Mardiasmo:2014:20).

Teknologi informasi sekarang ini telah berkembang pesat. Hal ini menyebabkan akses terhadap informasi menjadi semakin cepat dan mudah. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi, sistem informasi seperti internet, komputer, software memungkinkan pengguna (*users*) mengolah atau mendapatkan informasi yang diinginkannya.

Keadaan ini sangatlah menguntungkan karena barang siapa yang memperoleh informasi lebih dibandingkan dengan orang lain, maka orang tersebut akan memiliki nilai (*value*) lebih jika dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai informasi akan hal tertentu (Maziyar, Vahid, Mohammad, Elham, 2011).

Peranan aplikasi di sektor pemerintahan tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan sektor swasta. Instansi diharapkan bekerja dan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu instansi juga harus bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, dimana anggaran tersebut sudah seharusnya terserap untuk kegiatan operasionalnya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pelaporan laporan keuangan yang menunjukkan berapa besarnya penyerapan anggaran yang digunakan beserta penjelasannya.

Pada akhirnya pemerintah kabupaten Pesisir Barat menjalin kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung. Sesuai dengan Nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten pesisir barat dan perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor 05/4.09/2014 dan MoU-17/PW08/3/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang pengembangan manajemen pemerintah daerah. Maka aplikasi yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan Kabupaten Pesisir Barat adalah aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Keuangan.

Adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan BPKP Provinsi Lampung maka semua kegiatan proses pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggunakan

aplikasi SIMDA. Pada awal mulanya, aplikasi SIMDA hanya dipakai untuk proses perencanaan, untuk pembuatan RKA dan DPA pada bidang anggaran di tahun 2014. Namun pada akhir tahun 2015 bagian pentausahaan mulai menggunakan SIMDA dan juga pelaporan keuangan.

Penggunaan aplikasi SIMDA yang sudah aktif, akhirnya Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Barat membuat keputusan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah yang akan mengajukan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) maupun Lumpsum (LS) tidak diwajibkan lagi membawa berkas fisik. Mereka cukup melakukan input data pada aplikasi SIMDA sesuai permintaan mereka. Setelah itu, mereka diwajibkan membawa SPP, SPM, Ceklis Verifikasi dan Surat Rekomendasi dari Kepala OPD untuk diserahkan kepada bidang perbendaharaan BPKAD Kabupaten Pesisir Barat. Berkas fisiknya tetap berada di kantor OPD masing-masing, tidak diajukan lagi ke kantor BPKAD Pesisir Barat.

Pada saat proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka diperlukan semua data dan dokumen pendukung guna menyelesaikan laporan yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketika menemukan masalah dalam penyusunan laporan, maka para penyusun laporan membutuhkan dokumen fisik untuk mengecek ulang dan mencocokkan nilai yang ada hingga valid. Sebagai contoh, ketika ada masalah dalam kontrak pembangunan gedung kantor, maka penyusun laporan tidak bisa mencari berkas yang ada di gudang BPKAD, mereka harus meminta dulu ke bagian OPD yang membuat kontrak tersebut. Terkadang proses ini memakan waktu lama karena melibatkan pihak lain dalam pencarian berkas.

Penggunaan SIMDA yang sudah lengkap, mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan, harusnya bisa membuat sedikit lebih baik dalam hal proses administrasi yang ada. Semua nilai anggaran dan belanja telah masuk dalam sistem. Tetapi apakah hal ini bisa membuat laporan yang ada menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apalagi tidak didukung dengan berkas fisik yang masuk ke kantor BPKAD.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang penerapan SIMDA Keuangan khususnya tentang pemahaman pegawai, faktor-faktor pendukung penerapan SIMDA Keuangan serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan, maka peneliti mengambil judul sebagai berikut. "Evaluasi Pemanfaatan Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam Pelaporan Keuangan Kabupaten Pesisir Barat".

B. Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian diantaranya :

- a. Dengan pemakaian aplikasi, tentu membuat pegawai masih bingung dalam hal pengoperasian.
- b. Berawal dari manual, dan berakhir dengan penggunaan aplikasi, tentu saja hal ini akan membuat perubahan pada pemkab Pesisir Barat.
- c. Dengan tidak adanya berkas yang masuk ke bidang perbendaharaan dan akuntansi, maka penyusun laporan tidak akan bisa menemukan dokumen ketika menemukan kendala dengan barang tersebut. Apakah dengan penggunaan aplikasi dapat membantu dalam proses penyusunan laporan pemkab Pesisir Barat.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sejauhmana pemahaman pegawai tentang SIMDA Keuangan pada Pemkab Pesisir Barat?
- b. Apa saja kelebihan dan kekurangan SIMDA keuangan dalam proses penyusunan laporan keuangan?
- c. Bagaimana kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA keuangan pada Pemkab Pesisir Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pegawai tentang SIMDA Keuangan.
- b. Untuk mengetahui apakah penggunaan SIMDA sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada.
- c. Untuk mengetahui kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dalam penyusunan laporan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai:

- a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.
- b. Sebagai wahana bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari serta, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kesuksesan penggunaan SIMDA Keuangan dan Mendorong agar pemerintah daerah lain menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan.
- b. Sebagai bahan masukan kepada pihak pengembang, yaitu BPKP, agar aplikasi yang digunakan selalu memenuhi harapan pengguna.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun Anggaran 2018 khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat yang berkaitan langsung dengan SIMDA Keuangan.